

Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*: Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di IDX-MES BUMN 17 Tahun 2021-2024

Idu Aulia^{1*}, Zuliansyah², Yusuf Bachtiar³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: iduaulia@gmail.com¹, zuliansyah@radenintan.ac.id², myusufbachtiar@radenintan.ac.id³

Article Info :

Received:

05-12-2025

Revised:

08-01-2025

Accepted:

15-01-2026

Abstract

The disclosure of Sustainability Reports by State-Owned Enterprises (SOEs) plays an important role not only in complying with regulatory requirements, but also in building the company's image and stakeholder trust. This study aims to analyze the influence of Good Corporate Governance and financial performance on the disclosure of Sustainability Reports in SOEs listed on the IDX-MES BUMN 17 index for the period 2021–2024. The research sample consisted of 9 companies with a total of 36 observations obtained through purposive sampling. Data analysis was performed using descriptive statistics, classical assumption tests, and hypothesis testing with the help of Microsoft Excel and SPSS version 22. The results show that Good Corporate Governance and financial performance influence Sustainability Report disclosure, while independent boards of commissioners and audit committees do not. Simultaneously, all research variables have a significant effect on Sustainability Report disclosure.

Keywords: *Sustainability Report, Independent Board of Commissioners, Audit Committee, Good Corporate Governance, Financial Performance.*

Abstrak

Pengungkapan Sustainability Report pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan penting tidak hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga dalam membangun citra perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Good Corporate Governance dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan BUMN yang tergabung dalam indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2021–2024. Sampel penelitian terdiri atas 9 perusahaan dengan total 36 observasi yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis dengan bantuan Microsoft Excel dan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report, sementara dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh. Secara simultan, seluruh variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report.

Kata kunci: *Sustainability Report, Dewan Komisaris Independent, Komite Audit, Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan.*



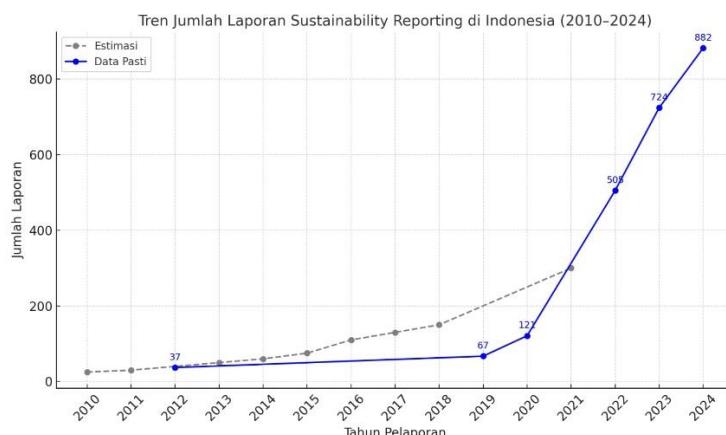
©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sustainability report atau laporan keberlanjutan kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strategi perusahaan, baik yang berorientasi pada laba maupun yang berorientasi pada kepentingan sosial dan lingkungan. Laporan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kebijakan dan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan keberlanjutan, yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) (Adhipradana, et al., 2013). Di Indonesia, perusahaan milik negara (BUMN) yang terdaftar dalam IDX-MES BUMN 17, sebagai bagian dari BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), memiliki tanggung jawab besar dalam

mengedepankan transparansi dan akuntabilitas terhadap public salah satunya pengungkapan *sustainability report* (Amin, et al. 2023).

Pengungkapan laporan keberlanjutan pada BUMN tidak hanya berfungsi untuk memenuhi tuntutan regulasi tetapi juga untuk memperkuat citra perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan (Aniktia, et al. 2015) Prakteknya, meski pengungkapan *sustainability report* terus meningkat setiap tahun tetapi masih ada saja perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Terbukti dari 158 perusahaan manufaktur masih terdapat 13 perusahaan yang tidak mengungkapkan *sustainability report*. Dua dari tiga belas perusahaan tersebut yaitu PT Sekar Laut dan PT Siantar Top pernah diberitakan melakukan pencemaran lingkungan yaitu pembuangan limbah cair ke sungai, namun penyelesaiannya hanya sebatas pembayaran kompensasi dan menyebabkan protes masyarakat kembali terjadi (Astuti, et al., 2017) Selain itu, penelitian Kusuma & Priantinah (2018) juga menemukan rendahnya pengungkapan *sustainability report* yaitu sebesar 33,20% (Aulia, et al. 2024). Kurangnya antusias dan pemahaman perusahaan pada pentingnya peran dari lingkungan dan sosial menjadi penyebab rendahnya angka pengungkapan tersebut (Christian, et al. 2023):



Gambar 1. Tren Jumlah Laporan *Sustainability Reporting* Periode Pelaporan Tahun 2010-2020
Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Gambar 1 menggambarkan bahwa laporan *sustainability report* di indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2016, terjadi peningkatan yang lebih signifikan. Estimasi menunjukkan bahwa jumlah laporan mencapai sekitar 150 pada 2016, dan terus meningkat hingga sekitar 200 laporan pada 2019. Namun, data pasti untuk 2019 menunjukkan jumlah hanya 67 laporan, yang berarti estimasi lebih tinggi dibanding realisasi saat itu. Mulai tahun 2020, peningkatan jumlah laporan terlihat sangat tajam. Kenaikan tajam ini mencerminkan peningkatan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya pelaporan keberlanjutan, kemungkinan juga dipengaruhi oleh regulasi, tuntutan investor, dan tren global menuju praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Namun pada periode tahun 2010 sampai 2015 jumlah laporan masih tergolong rendah dan tumbuh secara perlahan. Tahun 2012 tercatat hanya ada 37 laporan, yang menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya laporan keberlanjutan masih terbatas di kalangan perusahaan Indonesia (Jannah, & Kurnia, 2016). Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi. Perusahaan kurang memperhatikan dan mengesampingkan pengungkapan *sustainability report*, Perusahaan tidak bersifat terbuka dalam menjalankan bisnisnya dan belum sepenuhnya berkomitmen sepenuhnya dengan *good corporate governance* (Lestari, 2018). Perusahaan menganggap *sustainability report* sebagai biaya tambahan dalam pengeluaran perusahaan karena adanya tambahan biaya-biaya lain menunjang pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dewan komisaris independent, komite audit, dan kinerja keuangan (Liana, 2019).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainable report* yaitu dewan komisaris independent berperan penting dalam keterbukaan informasi perusahaan karena bertugas secara umum dan/atau khusus untuk mengawasi dewan direksi serta sebagai penengah agar tidak terjadi benturan kepentingan dengan pemegang saham (Nurahma, et al, 2022). Menurut Effendi (2016), proporsi komisaris independen harus minimal 30% karena komisaris independen yang besar jumlahnya

diduga mampu meningkatkan objektifitas serta memberikan tekanan kepada perusahaan untuk membuka informasi yang seluas-luasnya (Putra, et al. 2024).

Hal ini sejalan dengan penelitian William Christian Hariono dan Stephana Dyah Ayu yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berdampak pada pengungkapan *Sustainability Report* (Roviqoh, et al. 2021) Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizah Naila Sofa yang menyatakan dewan komisaris independent tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* (Saputro, et al. 2013) Kemudian penelitian Iwan Setiadi dkk menjelaskan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Komite audit berfungsi untuk menunjang dewan komisaris mengawasi direksi melalui audit laporan keuangan, pelaksanaan manajemen risiko serta perwujudan GCG (IKAI dalam Effendi, 2016:48). Raharjo telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa seringnya penyelenggaraan rapat komite audit akan meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan terhadap dewan direksi dalam menerapkan GCG termasuk mengenai keterbukaan informasi berupa *sustainability report* sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada stakeholder (Setiadi, et al. 2023). Berdasarkan penelitian William Christian Hariono dan Stephana Dyah Ayu komite audit berdampak pada pengungkapan *Sustainability Report* (Sofa, et al. 2020) Selanjutnya penelitian dari Rosita Wulandari, Syifa Fauziyah dan Ali Mubarok menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* (Tjandrapurnama, et al. 2023). Disisi lain, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Istiani Roviqoh dan Muhammad Khafid menjelaskan bahwa komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan *sustainability*.

Kemudian faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* yaitu *good corporate governance*. perusahaan yang menerapkan GCG secara efektif cenderung akan meningkatkan praktik pengungkapan *sustainability reporting* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini sesuai dengan pandangan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan harus bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang memiliki kepentingan atas kegiatan perusahaan. Sejalan dengan penelitian Rahmat menyatakan bahwa Implementasi *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability report* (Kamaluddin et al. 2022). Kemudian penelitian fatihah membuktikan bahwa efisiensi tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Ainaya et al. 2022). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saraswati menjelaskan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap *sustainability report* (Wiwik et al. 2024).

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Rudianto kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas (Tobing, et al. 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umi Aniswatur Roudtur Jannah dan Kurnia Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sementara itu, variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Wulandari, et al. 2021). Kemudian Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irna Dian Lestari dan Andayani menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan yang diproksikan dengan profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Yahdi, et al. 2024). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anggoro Saputro dkk menjelaskan bahwa secara parsial profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Kemudian penelitian dari Mujiani & Jayanti juga yang membuktikan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* (Yudaruddin, et al. 2016).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena masih terdapat kesenjangan penelitian (gap) terdahulu yang perlu dikaji kembali. Kemudian masih terdapat fenomena perusahaan yang tidak mengungkapkan *sustainability report* karena kurangnya antusias dan pemahaman perusahaan pada pentingnya peran dari lingkungan dan sosial menjadi penyebab rendahnya angka pengungkapan tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh

dewan komisaris independent, komite audit dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sehingga penelitian ini berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris Independent, Komite Audit, *Good Corpotare Governance*, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di IDX-MES BUMN 17 Tahun 2021-2024)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari 13 perusahaan BUMN yang terdaftar di IDX-MES BUMN 17 selama periode 2021–2024, yang dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria laporan keuangan dan publikasi annual report. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan variabel independen berupa Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Good Corporate Governance, dan Kinerja Keuangan, serta variabel dependen berupa Sustainability Report yang diukur berdasarkan indikator GRI G4. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), dan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen, serta pengujian hipotesis menggunakan uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi (Adjusted R²) dengan bantuan Microsoft Excel dan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS Versi 22 sebagai alat dalam menganalisis data. Adapun data yang akan dianalisis antara lain sebagai berikut:

Hasil Analisis Statistik

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan simpangan baku guna memahami kondisi Sustainability Report, Good Corporate Governance, dan kinerja keuangan perusahaan BUMN:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	36	.000	66.667	41.7107	14.227615
Komite Audit	36	14	45	26.03	7.474
Kepemilikan Institusional	36	.510	.929	.64495	.138308
Kepemilikan Manajerial	36	.000	.062	.00705	.019804
Dewan Direksi	36	3	10	6.11	1.968
Kinerja Keuangan	36	.225	28.174	6.76979	6.705091
<i>Sustainability reporting</i>	36	.225	.944	.58084	.224925
Valid N (listwise)	36				

Sumber: SPSS Versi 22.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa dari 36 observasi, variabel Dewan Komisaris memiliki nilai minimum 0,000, maksimum 66,667, dan rata-rata 41,71; Komite Audit memiliki nilai minimum 14, maksimum 45, dan rata-rata 26,03; Kepemilikan Institusional berkisar antara 0,510–0,929 dengan rata-rata 0,645; serta Kepemilikan Manajerial berada pada rentang 0,000–0,062 dengan rata-rata 0,007. Dewan Direksi memiliki jumlah minimum 3 dan maksimum 10 dengan rata-rata 6,11, sedangkan Kinerja Keuangan menunjukkan rentang 0,225–28,174 dengan rata-rata 6,77 dan variasi yang tinggi. Sustainability Reporting memiliki nilai minimum 0,225, maksimum 0,944, dan rata-rata 0,581, yang menunjukkan tingkat pengungkapan keberlanjutan yang relatif moderat.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
		Unstandardized Residual	
N			36
Normal	Mean		0.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation		0.09295263
Most Extreme Differences	Absolute		0.125
	Positive		0.125
	Negative		-0.083
Test Statistic			0.125
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			0.167
Monte Carlo Sig.			0.164
Sig. (2-tailed) ^d	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.154
		Upper Bound	0.173

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: SPSS Versi 22

Uji normalitas dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap unstandardized residual dengan jumlah observasi sebanyak 36 data. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,167 dan Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,164, yang keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Asumsi normalitas telah terpenuhi dan analisis regresi dapat dilanjutkan.

Uji Multikolinearitas

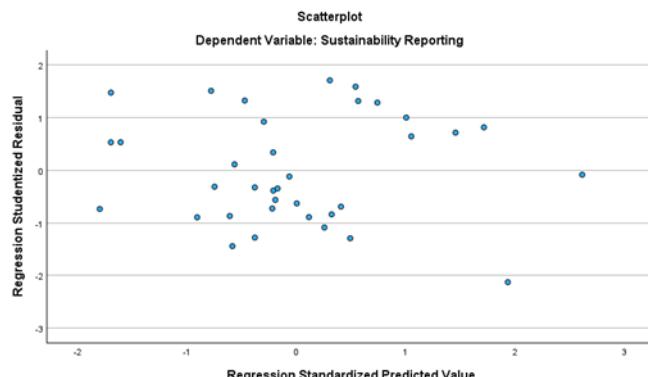
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Dewan Komisaris	0.765	1.308
	Komite Audit	0.772	1.295
	GCG	0.831	1.203
	Kinerja Keuangan	0.913	1.095

Sumber: SPSS Versi 22.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) untuk mengetahui adanya hubungan linear antarvariabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai tolerance seluruh variabel berada pada kisaran 0,765–0,913 dan nilai VIF berkisar antara 1,095–1,308. Seluruh nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Heteroskedestisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedestisitas

Sumber: SPSS Versi 22.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati scatterplot antara Regression Standardized Predicted Value dan Regression Studentized Residual. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu vertikal. Tidak terlihat pola tertentu seperti mengerucut, melebar, atau bergelombang pada sebaran data. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

N	Durbin-Watson
36	1.811

Sumber: SPSS Versi 22.

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson dengan jumlah observasi sebanyak 36 data dan 4 variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,811. Nilai tersebut berada di antara batas atas ($d_U = 1,72$) dan $4 - d_U$ (2,28). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$

Tabel 5. Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1	(Constant) 0.412	0.068	
	Dewan 0.002	0.001	0.148
	Komisaris		
	Komite Audit 5.651E-5	0.003	0.003
	GCG -0.121	0.036	-0.394
	Kinerja 0.015	0.003	0.624
	Keuangan		

Sumber: SPSS Versi 22.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada Tabel 5, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y=0,412+0,002X_1+0,00005651X_2-0,121X_3+0,015X_4+e$. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 0,412 menunjukkan bahwa apabila variabel Dewan Komisaris, Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan Kinerja Keuangan dianggap bernilai nol atau konstan, maka nilai *Sustainability reporting* adalah sebesar 0,412. Nilai konstanta ini mencerminkan tingkat dasar pengungkapan *Sustainability Report* tanpa dipengaruhi oleh variabel independen dalam model penelitian.

Koefisien regresi variabel Dewan Komisaris (X_1) sebesar 0,002 dan bernilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Dewan Komisaris sebesar 1 satuan, maka *Sustainability reporting* (Y) akan meningkat sebesar 0,002, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki hubungan searah dengan pengungkapan *Sustainability Report*, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Koefisien regresi variabel Komite Audit (X_2) sebesar 0,00005651 dan bernilai positif. Artinya, setiap peningkatan jumlah rapat Komite Audit sebesar 1 satuan, maka *Sustainability reporting* (Y) akan meningkat sebesar 0,00005651, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien yang sangat kecil menunjukkan bahwa kontribusi Komite Audit terhadap pengungkapan *Sustainability Report* masih terbatas.

Koefisien regresi variabel *Good Corporate Governance* (GCG) (X_3) sebesar -0,121 dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan GCG sebesar 1 satuan, maka *Sustainability reporting* (Y) akan menurun sebesar 0,121, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Koefisien bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara GCG dan pengungkapan *Sustainability Report* dalam model penelitian ini.

Koefisien regresi variabel Kinerja Keuangan (X_4) sebesar 0,015 dan bernilai positif. Artinya, setiap peningkatan Kinerja Keuangan sebesar 1 satuan, maka *Sustainability reporting* (Y) akan meningkat sebesar 0,015, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien positif ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang lebih baik cenderung memiliki tingkat pengungkapan *Sustainability Report* yang lebih tinggi.

Uji T (Parsial)

Uji t dilakukan dalam pengujian hipotesis yaitu untuk dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. nilai signifikansinya kurang dari 0,05 ($\text{sig} < \alpha$) maka berarti hipotesis diterima, namun hipotesis tidak diterima jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($\text{sig} > \alpha$).

Tabel 6. Hasil Uji T

Model	t	Sig.
1 (Constant)	6.084	<0.001
Dewan Komisaris	1.216	0.233
Komite Audit	0.022	0.982
GCG	-3.381	0.002
Kinerja Keuangan	5.611	<0.001

Sumber: SPSS Versi 22.

Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial tidak seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability Reporting*. Variabel Dewan Komisaris memiliki nilai signifikansi 0,233 dan Komite Audit sebesar 0,982, yang keduanya lebih besar dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

Variabel *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki nilai signifikansi 0,002 dengan nilai t negatif, yang menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Sustainability Reporting*. Variabel Kinerja Keuangan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi < 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan yang lebih baik mendorong peningkatan pengungkapan *Sustainability Report*.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.561	4	.140	14.379	<.001 ^b
Residual	.302	31	.010		
Total	.863	35			

Sumber: SPSS Versi 22.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 14,379 dengan tingkat signifikansi < 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Komite Audit, Good Corporate Governance, dan Kinerja Keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report. Hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis selanjutnya

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan tingkat besarnya variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	Model Summary		
		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.806 ^a	.650	.605	.09877
a. Predictors: (Constant), Kinerja Keuangan, Dewan Komisaris, GCG, Komite Audit				

Sumber: SPSS Versi 22.

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,650, yang berarti 65% variasi pengungkapan Sustainability Reporting dapat dijelaskan oleh Kinerja Keuangan, Dewan Komisaris, Good Corporate Governance, dan Komite Audit, sedangkan 35% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,605 mengindikasikan bahwa model masih mampu menjelaskan 60,5% variasi variabel dependen setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel. Selain itu, nilai R sebesar 0,806 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel independen dan dependen. Nilai Std. Error of the Estimate sebesar 0,09877 menandakan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil, sehingga model regresi tergolong baik.

Dewan Komisaris Independen Terhadap Sustainability Report

Berdasarkan hasil uji t parsial, Dewan Komisaris Independen menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,233 yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05, sehingga variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan BUMN yang terdaftar di IDX-MES BUMN 17 periode 2021–2024. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris Independen secara individual belum mampu mendorong peningkatan transparansi pengungkapan informasi keberlanjutan perusahaan. Hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa efektivitas pengawasan dewan komisaris independen tidak selalu tercermin dalam praktik pelaporan non-keuangan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur tata kelola perusahaan dan implementasi pengawasan terhadap isu keberlanjutan (Anikta & Khafid, 2015; Adhipradana & Daljono, 2013).

Tidak signifikannya pengaruh Dewan Komisaris Independen dapat dipahami dari orientasi pengawasan yang masih dominan pada aspek keuangan dan kepatuhan formal terhadap regulasi. Fungsi pengawasan dewan komisaris independen cenderung difokuskan pada kinerja keuangan, pengendalian risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan pasar modal. Pengungkapan Sustainability Report sering kali

dipandang sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai bagian strategis dari tata kelola perusahaan. Pandangan ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa mekanisme corporate governance belum sepenuhnya terintegrasi dengan agenda keberlanjutan perusahaan (Aniktia & Khafid, 2015; Ainaya & Widiatmoko, 2022).

Ditinjau dari perspektif Teori Stakeholder, perusahaan seharusnya mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lingkungan, dan pihak non-ekonomi lainnya. Dewan Komisaris Independen secara normatif diharapkan mampu menjadi representasi kepentingan stakeholder yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut belum tercermin secara optimal dalam mendorong pengungkapan Sustainability Report. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perhatian terhadap kepentingan stakeholder non-keuangan belum menjadi prioritas utama dalam fungsi pengawasan dewan komisaris independen (Astuti & Juwenah, 2017; Amin et al., 2023).

Dalam kerangka Teori Legitimasi, pengungkapan Sustainability Report berfungsi sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh penerimaan sosial dari masyarakat. Ketidaksignifikanan pengaruh Dewan Komisaris Independen menunjukkan bahwa dorongan legitimasi melalui pelaporan keberlanjutan belum bersumber dari mekanisme internal tata kelola perusahaan. Praktik legitimasi lebih banyak dipicu oleh tekanan eksternal seperti regulasi, tuntutan investor, serta ekspektasi publik terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan BUMN. Fenomena ini menegaskan bahwa peran dewan komisaris independen masih bersifat pasif dalam mengarahkan strategi legitimasi perusahaan melalui Sustainability Report (Astuti & Juwenah, 2017; Annisa Fitri et al., 2022).

Hasil penelitian ini konsisten dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report, baik pada perusahaan BUMN maupun perusahaan publik secara umum. Penelitian Adhipradana dan Daljono (2013) serta Aniktia dan Khafid (2015) menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Temuan serupa juga dijelaskan oleh Ainaya dan Widiatmoko (2022) yang menilai bahwa efektivitas tata kelola perusahaan lebih ditentukan oleh kualitas implementasi daripada sekadar struktur formal. Peran Dewan Komisaris Independen dalam mendorong pengungkapan Sustainability Report masih memerlukan penguatan dari sisi komitmen, kompetensi, dan orientasi pengawasan keberlanjutan (Amin et al., 2023; Annisa Fitri et al., 2022).

Komite Audit Terhadap *Sustainability Report*

Berdasarkan hasil uji t parsial, variabel Komite Audit menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,982 yang berada jauh di atas ambang signifikansi 0,05, sehingga variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan BUMN yang terdaftar di IDX-MES BUMN 17 periode 2021–2024. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit secara individual belum mampu mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil ini memperlihatkan bahwa peran komite audit masih belum terintegrasi secara kuat dengan praktik pelaporan non-keuangan perusahaan. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas komite audit lebih banyak tercermin pada aspek keuangan dibandingkan isu keberlanjutan (Aulia & Putri, 2024; Christian & Ayu, 2023).

Tidak signifikannya pengaruh komite audit mencerminkan bahwa fokus utama pengawasan masih diarahkan pada laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi. Agenda pengawasan komite audit umumnya berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan dan mitigasi risiko keuangan jangka pendek. Pengungkapan Sustainability Report sering kali belum menjadi bagian utama dari ruang lingkup pengawasan komite audit, sehingga kontribusinya terhadap transparansi keberlanjutan relatif terbatas. Pola ini juga ditemukan dalam berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa komite audit belum secara aktif berperan dalam mendorong pelaporan keberlanjutan perusahaan (Lestari, 2018; Kamaluddin Rahmat, 2022).

Dalam Teori Stakeholder, komite audit diharapkan berperan menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi yang relevan bagi seluruh pemangku kepentingan. Informasi keberlanjutan memiliki nilai strategis bagi stakeholder karena mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit belum mampu menjembatani kebutuhan informasi stakeholder terkait aspek ESG melalui pengungkapan Sustainability Report. Kondisi ini memperlihatkan bahwa orientasi pengawasan komite audit masih cenderung berfokus pada

kepentingan pemegang saham dibandingkan kepentingan stakeholder yang lebih luas (Jannah & Kurnia, 2016; Liana, 2019).

Ditinjau dari Teori Legitimasi, Sustainability Report berfungsi sebagai instrumen perusahaan dalam membangun dan mempertahankan legitimasi sosial. Peran komite audit seharusnya memastikan bahwa pengungkapan keberlanjutan dilakukan secara kredibel, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ditemukannya pengaruh signifikan komite audit menunjukkan bahwa proses legitimasi perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti regulasi pemerintah dan tuntutan pasar, dibandingkan mekanisme pengawasan internal. Fenomena ini menegaskan bahwa komite audit belum menjadi aktor utama dalam strategi legitimasi perusahaan melalui pelaporan keberlanjutan (Aulia & Putri, 2024; Christian & Ayu, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai temuan empiris sebelumnya yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report. Penelitian Lestari (2018) serta Liana (2019) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum mampu meningkatkan transparansi keberlanjutan secara langsung. Temuan serupa juga dijelaskan oleh Kamaluddin Rahmat (2022) yang menilai bahwa efektivitas tata kelola perusahaan dalam mendorong pelaporan keberlanjutan lebih ditentukan oleh komitmen manajemen dan tekanan eksternal. Peran komite audit dalam mendukung pengungkapan Sustainability Report masih memerlukan penguatan dari sisi kewenangan, kompetensi, dan integrasi isu keberlanjutan dalam fungsi pengawasan (Jannah & Kurnia, 2016; Aulia & Putri, 2024).

Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Report

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance (GCG) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga GCG terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan BUMN yang terdaftar di IDX-MES BUMN 17 periode 2021–2024. Koefisien regresi yang bertanda negatif mencerminkan adanya hubungan berlawanan arah antara penerapan mekanisme GCG dan tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan struktur tata kelola perusahaan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan transparansi keberlanjutan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas GCG dalam konteks pelaporan non-keuangan masih menghadapi berbagai keterbatasan implementatif (Roviqoh & Khafid, 2021; Saputro et al., 2013).

GCG diproyeksikan melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi sebagai representasi mekanisme pengendalian internal perusahaan. Pengaruh signifikan GCG menunjukkan bahwa struktur tata kelola secara agregat memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan pengungkapan Sustainability Report. Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa penguatan mekanisme tersebut belum sepenuhnya diarahkan pada peningkatan kualitas maupun keluasan pelaporan keberlanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan GCG masih lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan efisiensi internal dibandingkan akuntabilitas sosial dan lingkungan (Nurahma & Budiharjo, 2022; Putra & Utomo, 2024).

Kepemilikan institusional yang relatif besar pada perusahaan BUMN belum selalu diikuti oleh tekanan aktif dari investor institusi terhadap pengungkapan aspek keberlanjutan. Investor institusional di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan berfokus pada stabilitas perusahaan, profitabilitas, serta risiko keuangan. Orientasi tersebut menyebabkan isu pengungkapan ESG belum menjadi agenda utama dalam fungsi monitoring yang dilakukan oleh investor institusi. Akibatnya, peningkatan kepemilikan institusional tidak secara otomatis mendorong perusahaan untuk memperluas atau memperdalam pengungkapan Sustainability Report (Roviqoh & Khafid, 2021; Saputro et al., 2013).

Kepemilikan manajerial yang merefleksikan keterlibatan manajemen dalam struktur kepemilikan saham juga belum menunjukkan kontribusi positif terhadap pengungkapan keberlanjutan. Manajemen cenderung memprioritaskan pencapaian target kinerja keuangan jangka pendek yang berdampak langsung pada insentif dan evaluasi kinerja. Praktik pelaporan Sustainability Report sering dipersepsi sebagai aktivitas tambahan yang memerlukan biaya dan sumber daya tanpa manfaat finansial langsung. Kondisi ini menjelaskan mengapa peningkatan kepemilikan manajerial justru dapat berkorelasi dengan efisiensi pengungkapan non-keuangan perusahaan (Nurahma & Budiharjo, 2022; Saputro et al., 2013).

Keberadaan dan ukuran dewan direksi sebagai bagian dari mekanisme GCG juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan agenda keberlanjutan perusahaan. Dewan direksi masih memusatkan

perhatian pada pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan operasional dan kinerja keuangan, sementara isu lingkungan dan sosial belum menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis jangka panjang. Dalam perspektif Teori Stakeholder, kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan GCG masih berorientasi pada kepentingan pemegang saham utama. Dalam Teori Legitimasi, pengungkapan Sustainability Report lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan eksternal dibandingkan dorongan internal dari mekanisme GCG yang telah dibangun perusahaan (Putra & Utomo, 2024; Roviqoh & Khafid, 2021).

Kinerja Keuangan Terhadap *Sustainability Report*

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel Kinerja Keuangan memiliki nilai signifikansi $< 0,001$ yang berada jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga kinerja keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan BUMN yang terdaftar di IDX-MES BUMN 17 periode 2021–2024. Temuan ini memperlihatkan bahwa perusahaan dengan tingkat kinerja keuangan yang lebih baik cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi dalam menyampaikan informasi keberlanjutan secara lebih luas dan terstruktur. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kemampuan finansial perusahaan dan intensitas pengungkapan aspek lingkungan serta sosial. Hasil ini menguatkan pandangan bahwa kinerja keuangan menjadi fondasi penting dalam mendukung praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan (Tobing et al., 2019; Setiadi et al., 2023).

Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola sumber daya secara efisien, sehingga memberikan ruang finansial yang memadai untuk menjalankan aktivitas keberlanjutan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan dana bagi program sosial, lingkungan, serta penyusunan Sustainability Report yang membutuhkan biaya dan sumber daya yang tidak kecil. Keberlanjutan pelaporan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang yang bertujuan menjaga daya saing dan reputasi perusahaan. Pola ini konsisten dengan temuan empiris yang menegaskan bahwa profitabilitas merupakan salah satu determinan utama pengungkapan Sustainability Report (Sofa & Respati, 2020; Tobing et al., 2019).

Dalam perspektif Teori Stakeholder, perusahaan dengan kinerja keuangan yang kuat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Pengungkapan Sustainability Report berfungsi sebagai media komunikasi yang menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola kepada investor, masyarakat, serta regulator. Kinerja keuangan yang positif memperkuat posisi perusahaan dalam membangun kepercayaan stakeholder melalui transparansi informasi keberlanjutan. Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan yang sehat secara finansial lebih responsif terhadap tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik (Tjandrapurnama & Oktaviani, 2023; Setiadi et al., 2023).

Dalam Teori Legitimasi, kinerja keuangan yang tinggi mendorong perusahaan untuk menjaga reputasi dan penerimaan sosial melalui pengungkapan Sustainability Report. Pelaporan keberlanjutan menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa keberhasilan finansial perusahaan selaras dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa pencapaian ekonomi seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari amanah sosial perusahaan. Pandangan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan keberlanjutan sebagai refleksi tanggung jawab moral dan sosial dalam praktik bisnis modern (Shihab, 2022; Tobing et al., 2019).

Dewan Komisaris Independent, Komite Audit, *Good Corpotare Governance*, Dan Kinerja Keuangan Tidak Berpengaruh Secara Bersama-Sama Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi $< 0,001$ yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Good Corporate Governance, dan Kinerja Keuangan terbukti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan BUMN yang terdaftar di IDX-MES BUMN 17 periode 2021–2024. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi seluruh variabel independen memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa model regresi memiliki daya jelaskan yang memadai ketika seluruh mekanisme tata kelola dan

kondisi keuangan dianalisis secara bersama. Pola ini menunjukkan bahwa pengungkapan Sustainability Report merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor internal perusahaan yang saling berkaitan (Wulandari et al., 2021; Yudaruddin & Pratiwi, 2016).

Mekanisme tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan membentuk sistem pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi arah kebijakan pengungkapan keberlanjutan. Meskipun secara parsial tidak seluruh variabel menunjukkan pengaruh signifikan, keberadaan variabel-variabel tersebut secara bersamaan menghasilkan tekanan internal yang lebih kuat terhadap manajemen perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan tidak dapat dinilai secara terpisah, melainkan perlu dipahami sebagai satu kesatuan sistem pengendalian. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan pentingnya sinergi antara struktur tata kelola dan kondisi keuangan dalam mendorong transparansi keberlanjutan perusahaan (Wiwik Saraswati et al., 2024; Wulandari et al., 2021).

Dalam Teori Stakeholder, hasil simultan ini mencerminkan bahwa pemenuhan kebutuhan informasi stakeholder baru terasa signifikan ketika mekanisme pengawasan internal dan kapasitas finansial perusahaan berjalan secara bersamaan. Tekanan dari pemegang saham, regulator, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi lebih efektif ketika perusahaan memiliki struktur tata kelola yang memadai serta dukungan kinerja keuangan yang stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada satu aktor atau mekanisme tertentu, melainkan pada kerja kolektif seluruh elemen internal perusahaan. Pandangan ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa pengungkapan keberlanjutan dipengaruhi oleh kombinasi faktor tata kelola, kepemilikan, dan profitabilitas perusahaan (Yahdi & Amrie, 2024; Yudaruddin & Pratiwi, 2016).

Dalam Teori Legitimasi, pengungkapan Sustainability Report berfungsi sebagai strategi perusahaan dalam mempertahankan penerimaan sosial dan kepercayaan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi perusahaan lebih efektif dibangun melalui kombinasi faktor internal, bukan melalui satu mekanisme tata kelola atau kinerja keuangan secara individual. Integrasi antara tata kelola perusahaan yang terstruktur dan kinerja keuangan yang memadai memperkuat posisi perusahaan dalam menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengaruh simultan variabel tata kelola dan keuangan memberikan dampak yang lebih kuat terhadap pengungkapan Sustainability Report dibandingkan pengaruh parsial masing-masing variabel (Wiwik Saraswati et al., 2024; Wulandari et al., 2021; Yudaruddin & Pratiwi, 2016).

Dewan Komisaris Independent, Komite Audit, *Good Corporation Governance*, Kinerja Keuangan, dan Pengungkapan Sustainability Report Berdasarkan Perspektif Islam

Dalam Islam, pengawasan dan kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab duniawi, tetapi juga bernilai ukhrawi. Beberapa prinsip utama Islam yang sejalan dengan peran komisaris independen antara lain *Amanah* (Kepercayaan), Komisaris independen memikul amanah untuk menjaga kepentingan perusahaan, pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, tanpa berpihak atau menyalahgunakan wewenang. ‘*Adalah* (Keadilan), Keadilan menjadi nilai dasar dalam Islam. Komisaris independen wajib bertindak adil, tidak memihak, dan menghindari perlakuan diskriminatif dalam pengambilan keputusan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ بِإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئَاتِهِ بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa : 58)

Tafsir: Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya (Shihab, 2022).

Dalam buku Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Surat An-Nisa ayat 58 ditafsirkan sebagai perintah untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya dan menetapkan hukum secara adil. Allah swt menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Ketika diberi tanggung jawab untuk menetapkan hukum atau memutuskan perkara, umat Islam diminta untuk bertindak dengan adil tanpa pandang bulu. Keadilan adalah prinsip yang mendasari sistem nilai Islam dan merupakan pijakan utama dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis (Shihab, 2022).

Menurut Profesor Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, bahwa ayat memerintahkan menunaikan amanah, ditekakkannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada ahlihā yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya: apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ra (Shihab, 2022).

Syura (Musyawarah), Prinsip syura mengajarkan pentingnya proses konsultasi dalam mengambil keputusan. Dewan komisaris, termasuk yang independen, memiliki peran dalam memberi masukan strategis melalui musyawarah bersama direksi. *Hisbah* (Pengawasan Islami), Hisbah merupakan mekanisme pengawasan dalam Islam untuk memastikan bahwa masyarakat, termasuk para pelaku usaha, menjalankan aktivitas sesuai syariat dan nilai-nilai kebaikan. Dalam konteks modern, komisaris independen dapat diibaratkan sebagai *muhtasib*, yakni pengawas yang menjaga agar perusahaan berjalan lurus, etis, dan tidak zalim. *Mas'uliyah* (Tanggung Jawab), Dalam Islam, setiap pemimpin atau pengawas akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya.

Komite audit dijadikan sebagai fungsi pengawasan. Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam al Qur'an surat As-Shof ayat 3:

كُبُرَ مَقْتَلًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَثُولُوا مَا لَا تَعْلُوْنَ

Artinya : “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam Surat Al-Sajdah ayat 5 berikut:

يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَغْرُبُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَثَدَّاً لِّكُلِّ سَنَةٍ مَّا قَدَّمُوا

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungannya”.

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن (الحديث)

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan.

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik. Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut (Annisa Fitri et al., 2022):

Tahuid, dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 38 :

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَلَمْ يَرْعِيْمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضَرِّ هُنَّ كُشَفُتْ صُرْقَةٌ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هُنَّ مُمْسِكُتْ رَحْمَةٍ فَلَمْ

حَسِبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya : “Sungguh, jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya kepada mereka (kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka (sesembahan itu) mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya? Katakanlah, Cukuplah Allah (sebagai pelindung) bagiku. Hanya kepada-Nya orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua aktivitas yg dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

Taqwa dan ridha, prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS at-Taubah: 109.

أَقْمَنَ أَسْسَنَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَوْفِيٍّ مِّنَ اللَّهِ وَرَضَوْاٍ حَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسْسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاعَ جُرْفٍ
هَارِ فَاهْتَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلَمِينَ

Artinya: “Maka, apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan rida(-Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di sisi tepian jurang yang nyaris runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membantalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), *tawazun* atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-adalah* atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

Kemashlahatan, *mashlahat* diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli usul fiqh mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsaladah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni (Annisa Fitri et al., 2022): pemeliharaan agama (*hifdzud-din*), pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*), pemeliharaan akal (*hifhzul-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifhzun-nasl*), pemeliharaan harta benda (*hifhzul-maal*).

Dalam pandangan ekonomi Islam, kinerja (hasil kerja) terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang individu relevan dengan standar tertentu. Didalam surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُلْكُلُونَ الرِّزْوَأَ لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسْلِمِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا أَنَّهَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّزْوَأَ وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَرَحِمَ الرِّزْوَأَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَنْهَى إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ غَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena

mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al Baqarah [2] : 275).

Quraish Shihab menjelaskan, jual beli dalam Islam dihalalkan karena sifat transaksinya yang berbeda dengan riba. Jual beli adalah transaksi yang melibatkan usaha dan aktivitas dari kedua belah pihak yang terlibat, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi keduanya. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli berasal dari kerja manusia dan pengelolaan yang baik, sehingga transaksi ini mengandung risiko untung maupun rugi, tergantung pada keahlian dan situasi pasar. Sebaliknya, riba adalah praktik yang justru memberikan keuntungan sepahk bagi pemilik modal. Dalam riba, keuntungan didapatkan hanya dari berjalan waktu, tanpa adanya kontribusi nyata dari kerja, usaha, atau keahlian manusia (Shihab, 2022).

Ayat ini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan, baik di tingkat makroekonomi maupun mikroekonomi, melalui beberapa aspek ((Shihab, 2022). Stabilitas Finansial : Sistem keuangan yang didasarkan pada riba cenderung tidak stabil. Praktik riba, yang mendorong eksplorasi dan utang yang menumpuk, dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan meningkatkan risiko keruntuhan finansial. Sebaliknya, sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip jual beli dan bagi hasil cenderung lebih stabil karena risikonya ditanggung bersama. Etika dan Berkah: Quraish Shihab menekankan bahwa rezeki yang diperoleh dengan cara halal, seperti jual beli, akan mendatangkan keberkahan. Kinerja keuangan yang didasarkan pada etika akan cenderung berkelanjutan dan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sebaliknya, kinerja yang dipacu oleh riba, meskipun mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, tidak memiliki keberkahan dan rentan terhadap kehancuran.

Keadilan Ekonomi: Praktik riba dapat memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Pihak yang membutuhkan sering kali terjebak dalam lingkaran utang yang terus bertambah, sementara pemberi utang terus menikmati keuntungan tanpa risiko. Kinerja keuangan yang berbasis syariah justru mendorong keadilan dengan mendorong transaksi yang saling menguntungkan, seperti jual beli, atau skema bagi hasil. Motivasi dan Produktivitas: Pengharaman riba mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan usaha yang produktif (jual beli) daripada hanya mengandalkan tambahan keuntungan dari pinjaman. Kinerja keuangan suatu entitas didasarkan pada nilai tambah riil dari barang atau jasa yang dihasilkan, bukan dari penumpukan utang.

Pembangunan keberlanjutan diidealkan dalam Islam, pendirian sistem Ekonomi Islam dan kebangkitan lembaga pengelola sumber daya Islam tradisional setidaknya merupakan dua tujuan utama yang harus dikejar dalam mendukung pembangunan keberlanjutan. Rekomendasi landasan filosofis berupa Islamic Eco-ethics merupakan salah satu metode untuk memasukkan sistem ekonomi Islam kedalam pembangunan keberlanjutan. *Islamic Eco-ethics* pada hakikatnya menyajikan gagasan perspektif ekonomi Islam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan. Alhasil, penggunaan Islamic Eco-ethics di dunia Internasional sebagai landasan filosofis untuk model implementasi ekonomi hijau merupakan bentuk kontribusi ekonomi Islam bagi pembangunan bangsa yang bermartabat.

Al-adl (keadilan), *istihan* (mengutamakan yang lebih baik), *maslahah* (kebutuhan masyarakat), dan *urf* (adat istiadat) adalah contoh-contoh prinsip dasar etika Islam yang telah diintegrasikan secara utuh ke dalam prinsip dasar ekonomi Islam. Istishlah yang berarti perbaikan dan I'tidal yang berarti harmoni, keduanya merujuk pada cara baku yang harus ditempuh manusia untuk mencapai keselarasan dengan alam. Berikut ini ayat-ayat yang mencerminkan salah satu manfaat dalam pengungkapan *Sustainability Report* dalam surah Al-Baqarah: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَنْجُلْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسَفِّهُ
الْدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسْبِحُ بِهَمْكِينَ وَنُقْدِسُ لَكَ قَالَ لِنِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi". Mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengatahui apa yang tidak kamu ketahui (Q.S Al-Baqarah: 30).

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana manusia berfungsi sebagai Khalifah di bumi. Diketahui Adam menjabat sebagai Khalifah pertama yang menduduki do'a sebagai pengganti jin setelah jin dimusnahkan sebagai penghuni bumi sebelumnya. Sebagai pengganti Allah, Adam diutus untuk menegakkan hukum-hukumnya di dunia. Melalui *Sustainability Report* perusahaan akan memiliki strategi untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan pemberdayaan lingkungan. Lingkungan akan terpengaruh dengan tercapainya suatu tujuan. Pengelolaan resiko dan dampak lingkungan yang lebih baik dapat dikembangkan dan diimplementasikan melalui laporan keberlanjutan atau *Sustainability Report* yang akan menunjukkan ketercapaian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan BUMN yang tergabung dalam indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2021–2024, disimpulkan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report karena hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi masing-masing di atas 0,05. Good Corporate Governance berpengaruh signifikan dengan arah negatif, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,002 (< 0,05), yang mengindikasikan bahwa peningkatan mekanisme GCG secara formal belum diikuti oleh peningkatan kualitas dan luas pengungkapan sustainability report. Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sustainability Report dengan nilai signifikansi < 0,001, yang menandakan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan lebih baik memiliki kemampuan lebih besar dalam melakukan pengungkapan keberlanjutan. Secara simultan, Dewan Komisaris, Komite Audit, Good Corporate Governance, dan Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report, dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 14,379 dan signifikansi < 0,001, dengan kemampuan penjelasan model sebesar 65% (R Square = 0,650) dan Adjusted R Square sebesar 0,605.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhipradana, Fadhila, and Daljono. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (2011): 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6021/5809>.
- Ainaya Al Fatihah Jacobus Widiatmoko, (2022). Pengaruh Corporate Governance Efficiency Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan, *Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 1.
- Amin, Aminul, Kornelia Selvia, and Agussalim Andriansyah. (2023). Analisis Pengaruh Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021). *Jurnal Manajemen Dirgantara* 16 (1): 4149. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.913>.
- Anikta, Ria, and Muhammad Khafid. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysisi Journal* 4 (3): 110.
- Annisa Fitri et al., (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dengan Financial Distress Sebagai Intervening, *ESCAF: Universitas Bina Insan Lubuklinggau* 7, no. 1: 221-35, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3071>.
- Astuti, Apri Dwi, and Juwenah Juwenah. (2017). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan Yang Tergabung Dalam LQ 45 Tahun 2012-2013. *Accounthink : Journal of Accounting and Finance* 2 (01): 301–13. <https://doi.org/10.35706/acc.v2i01.733>.
- Aulia, Azwani, and Anike Putri. (2024). “Penentu Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan BUMN Di Indonesia.” *In Search* 23 (1): 26–42. <https://doi.org/10.37278/insearch.v23i1.839>.
- Christian, William, and Stephana Dyah Ayu. (2023). Pengaruh Dewan Komisaris Independensi, Komite Audit Serta Profitabilitas Yang Disertai Leverage Dalam Mengungkapkan Laporan Sustainability. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 10 (3): 226778. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52561>.
- Jannah, U. A. R., & Kurnia, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5 (2): 115.

- Kamaluddin Rahmat, (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Implementasi Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report, *Journal Of Accounting and Finance* 7, no. 2.
- Lestari, Irna Dian. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans* 7 (Maret): 122.
- Liana, Siska. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage , Ukuran Perusahaan Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 2 (2): 199208. <https://doi.org/10.36778/jesya.v2i2.69>.
- Nurahma, Suci, and Roy Budiharjo. (2022). Pengaruh Keputusan Pendanaan, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Return on Asset Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 7 (1): 35 48. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v7i1.364>.
- Putra, B K, and D C Utomo. (2024). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap CsrD Perusahaan Bumn (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Indonesia Periode. *Diponegoro Journal of Accounting* 13:114. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46091%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/46091/31744>.
- Roviqoh, Devi Istiani, and Muhammad Khafid. (2021). Profitabilitas Dalam Memediasi Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Business and Economic Analysis Journal* 1 (1): 1426. <https://doi.org/10.15294/beaj.v1i1.30142>.
- Saputro, Dwi Anggoro, Fachrurrozie, and Linda Agustina. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia 2 (4): 480– 88.
- Setiadi, Iwan, Dirvi Surya Abbas, and Imam Hidayat. (2023). Karakteristik Perusahaan, Komisaris Independen Dan Pengungkapan Sustainability Reporting. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol 10, No (X): 113.
- Shihab, M. Quraish. (2022). *Tafsir Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sofa, Faizah Naila, and Naila WeningTyas Respati. (2020). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017). *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 13 (1): 39.
- Tjandrapurnama, Kezia Kurniawati, and Rachmawati Meita Oktaviani. (2023). Determinants of Sustainability Report Disclosure in Indonesian Listed Banks. *Owner* 7 (4): 351019. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1696>.
- Tobing, Rotua Aprilya, Zuhrotun Zuhrotun, and Rusherlistyani Rusherlistyani. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 3 (1): 10223. <https://doi.org/10.18196/rab.030139>.
- Wiwik Saraswati Dimas Rama Pramudia Nely Tangke Rante, (2024). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Pertambangan, *Jurnal GeoEkonomi* 15, no. 2.
- Wulandari, Rosita, Syifa Fauziyah, and Ali Mubarok. (2021). Pengaruh Komite Audit Dan Struktur Modal Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Accounthink : Journal of Accounting and Finance* 6 (02): 181–93. <https://doi.org/10.35706/acc.v6i02.5616>.
- Yahdi, Mochamad, and Khairin Amrie. (2024). “Political Connection , Public Ownership , Pengungkapan CSR : Peran Moderasi Ukuran Perusahaan” 8:4174–85.
- Yudaruddin, Yanzil Azizi, and Kuswardani Chandra Pratiwi. (2016). Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Profitabilitas Terhadap Publikasi Sustainability Report Studi Kasus Pada Perusahaan Lq 45 (2017-2019). *Journal of Accounting Taxation and Finance*, 4655.